

**PEMBERDAYAAN KOMITE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH**

Oleh:

Agung Pramono

(Dosen PGSD IKIP PGRI Madiun)

ABSTRACT

Qualified human resources who have the right competence, skills, abilities, attitudes, behavior, motivation and commitment is needed in the global market competition. But the reality shoes that the quality of Indonesian human resources are relatively underdeveloped and very low. To overcome this obstacles required the participation of both government and society, in synergy, and particularly the school committee to provide education.

This paper discussed the school committees' participation in education. There are four kinds of participation: 1) the involvement in decision-making process, 2) the implementation of the program, 3) the gaining advantages of the program, and 4) the evaluation of the program. If all of these are performed together or as a whole, it will bring the potential of integrated development.

First, public participation in decisions making process, especially choosing the purpose alternatives by discussing ideas relating to mutual interest. Second, participation in the implementation of the program is continuation of the plan which has been agreed upon the planning, implementation, and objectives. It can take the forms of physical labor donations, financial donations, donations of material, moral contribution (counseling, advice), and the decision contribution. Third, participation in taking the benefit. This is not independent from the quality and the quantity of the achieved program implementation. Fourth, participation in the evaluation process related to the implementation of the program as a whole.

Keywords: empowerment, committees, education, school.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak dalam menghadapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sumber daya manusia berkualitas diperlukan di era pasar bebas yang mempersyaratkan berbagai keunggulan. Sumber daya manusia berkualitas memiliki aspek kompetensi, keterampilan, kemampuan, sikap, perilaku, motivasi dan komitmen (Fatah, 2000). Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif tertinggal dan sangat rendah (Muhaimin, 2001).

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan berkualitas, namun hal tersebut saat ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja karena sumber dana dan daya yang sangat terbatas, sebagaimana disampaikan Muhaimin (dalam Bastian, 2002)

Untuk itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena : (1) besarnya kebutuhan sumber daya dan dana pendidikan, (2) keterbatasan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung sistem pendidikan, (3) potensi yang cukup besar pada masyarakat, (4) perlunya secara bertahap meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat dan (5) karena partisipasi menjadi ukuran keberhasilan pendidikan (Sumarno, 1995).

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pendelegasian wewenang pendidikan oleh pemerintah kepada sekolah dan kepada masyarakat perlu dikembangkan. Dengan kewenangan tersebut sekolah merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan (Nursisto, 2002), yang dapat mengelola dan mengembangkan partisipasi semua pihak untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan. Anggapan bahwa partisipasi tidak diperlukan lagi atau cukup hanya membayar sumbangan dana pendidikan menjadi tidak relevan karena proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh dana saja.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan tersebut indikator kinerjanya adalah (1) tersusunnya konsep pendidikan nasional, termasuk konsep pembentukan

dewan pendidikan di tingkat kabupaten, (2) terlaksananya perintisan dewan pendidikan di tingkat kabupaten, (3) meningkatnya peran dan fungsi komite sekolah di SMK dan SMA (GBHN 1999-2002).

Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat tersebut, komponen *stake holder* sekolah yang terwadahi dalam komite sekolah harus memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain : macam-macam partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, berbagai pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta upaya mengoptimalkan peran dan fungsi komite sekolah mengembangkan partisipasi masyarakat. Pemahaman yang meningkat tentang pentingnya partisipasi dalam pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan dasar sebagai basis pendidikan formal perlu mendapat sentuhan manajemen yang lebih baik, agar prestasi anak didik menjadi lebih berkualitas. Pemberdayaan menurut Mulyasa (2002) sebagai peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Peningkatan kedudukan itu meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut : akses, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber daya dan dana, daya pengungkit, meningkat dalam hal kolektifnya, pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan, status, meningkatnya citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya, kemampuan refleksi kritisnya, menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah, legitimasi atas pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan masyarakat.

Untuk itulah tulisan dengan judul : Pemberdayaan komite dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini ditulis.

Dalam latar belakang tersebut, makalah ini akan mencoba membahas bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti “pembuatan keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat barang, keterampilan, bahan, dan jasa”. (Abbas, 2001). Partisipasi merupakan turut berperan sertanya di suatu kegiatan (Depdikbud, 2001).

Dari definisi di atas setidaknya dapat dijabarkan menjadi tiga ide berikut :

(1) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional, bukan sekedar aktivitas fisik tetapi aktivitas psikologis dan keterlibatan diri. (2) partisipasi adalah motivasi seseorang untuk memberikan sumbangan, kesempatan mengembangkan inisiatif dan kreatifitas ke arah tercapainya tujuan kelompok, bukan hanya memberikan persetujuan atas sesuatu yang harus diputuskan tetapi lebih merupakan hubungan sosial psikologis diantara anggota kelompok, dan (3) partisipasi merupakan penerimaan tujuan dalam aktifitas kelompok.

Macam-macam Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Partisipasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program (Cohen dan Uphoff, 1979). Apabila keempatnya dilakukan secara bersama-sama atau secara keseluruhan akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial (Davis, 1977). Keempat macam partisipasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

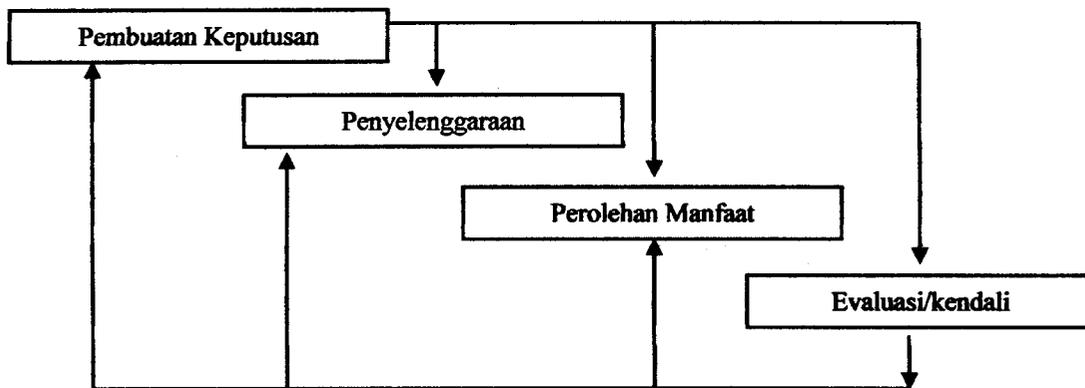
Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama terikat dengan penentuan alternatif tujuan dengan cara musyawarah tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan dilibatkan dalam menentukan arah dan orientasi pendidikan maka mereka cenderung lebih mempunyai rasa tanggung jawab untuk ikut melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena yakin bahwa program itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Wujud partisipasi ini seperti : kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen &

Uphoff, 1979). Dengan demikian pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dan rencana yang telah disepakati baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan, bentuknya berupa sumbangan tenaga fisik, sumbangan finansial, sumbangan material, sumbangan moral (nasehat, petuah), dan sumbangan keputusan (Konkon dan Suryatna, 1978). Ruang lingkup partisipasi ini meliputi : (1) menggerakkan sumber daya dan sumber dana, (2) kegiatan administrasi dan koordinasi, (3) penjabaran program (Draha, 1982).

Ketiga, partisipasi dalam mengambil manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas hasil pelaksanaan program yang dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar presentase keberhasilan atau target dicapai (Khairiwati, 2001). Partisipasi dalam mengambil manfaat meliputi : (1) menerima setiap hasil sebagai (seolah-olah) milik sendiri, (2) menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil program, (3) mengusahakan/menjadikan suatu lapangan usaha, mengeksploitasi, dan (4) memelihara secara rutin dan sistematis serta tidak membiarkan rusak (Draha, 1982). Partisipasi masyarakat dalam mengambil hasil dapat dilihat pada perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat yang merupakan akibat langsung dari program-program sekolah yang ditentukan.

Keempat, pentingnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi menurut Cohen dan Uphoff (1979) untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dapat dilakukan oleh lembaga formal secara langsung maupun perorangan dalam segenap aktivitas. Keempat jenis partisipasi dapat digambarkan dengan matrik berikut



GAMBAR 1. Partisipasi Dalam 4 Dimensi (Sumber Cohen & Uphoff, 1979)

Dilihat dari bentuknya, partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik (Basrowi, 1998). Partisipasi non fisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat menuntut ilmu pengetahuan, sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Sedangkan partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk : (1) menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan seperti mendirikan usaha persekolahan, (2) menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, (3) membantu pemerintah membangun gedung-gedung sekolah untuk masyarakat, dan (4) menyelenggarakan usaha perpustakaan atau bentuk bantuan yang lain.

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan bertingkat-tingkat. Partisipasi di tingkat pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah, partisipasi pendidikan di tingkat kabupaten dan seterusnya. Menurut Supriyono (2001) lingkup partisipasi dari (1) hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, (2) memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, (3) dalam bentuk keikutsertaan pasif, (4) adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu, (5) dalam memberikan pelayanan tertentu, (6) sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan, dan (7) peran serta sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang.

Dalam konsep MBS, partisipasi masyarakat, orang tua murid, anggota BP3, dan tokoh masyarakat sangat luas, meliputi antara lain :

Memberikan dukungan dana, atau sumbangan yang berupa fisik saja.

Merencanakan kegiatan dan kemungkinan pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya diberi rencananya setelah semua final, sehingga ada kesan hanya untuk basa basi dan “stempel” resmi dari BP3/masyarakat saja.

Ikut menambah guru yang tidak ada, atau kurang, bahkan menjadi “guru” pengganti. Umpamanya guru agama, kesenian, pramuka, pelatih renang dan sebagainya. Jadi BP3 dan tokoh masyarakat benar-benar merupakan mitra sejajar sekolah (kepada sekolah dan guru), yang ikut terlibat secara aktif memikirkan kemajuan sekolah.

Memberikan masukan dan mendiskusikan pelaksanaan pembelajaran, kinerja guru, prestasi belajar anak, kendala yang dihadapi dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang sudah ideal, masyarakat juga dapat terlibat dalam memilih dan memasukkan guru-guru yang diperlukan sekolah, serta memberhentikan guru yang prestasinya tidak memuaskan. (Supriono, 2002).

Pidarta (1988) memberi contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagai berikut :

- 1) Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putranya di rumah dan bila perlu memberi laporan berkonsultasi ke lembaga pendidikan,
- 2) menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putranya agar giat belajar,
- 3) menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan,
- 4) berusaha melunasi SPP dan dana pendidikan lainnya,
- 5) memberikan umpan balik terhadap lembaga pendidikan tentang pendidikan terutama yang menyangkut keadaan putranya,
- 6) bersedia datang ke lembaga pendidikan bila diundang,
- 7) ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti keuangan, sarana, kegiatan dan sebagainya,
- 8) membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam memajukan proses belajar,
- 9) meminjam perlengkapan pertukangan, perkembangan kesenian yang dibutuhkan lembaga,
- 10) bersedia menjadi tenaga pelatih dan nara sumber bila ditunjuk,
- 11) menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar di masyarakat,
- 12) memberi layanan-penjelasan kepada para pelajar yang belajar di masyarakat,
- 13) menjadi responden yang baik terhadap penelitian-penelitian siswa dan lembaga,
- 14) memberi bantuan penginapan kepada siswa yang praktek di masyarakat,
- 15) bagi

ahli pendidikan bersedia menjadi expert dalam membina lembaga pendidikan, 16) bagi hartawan bersedia memberikan bantuan dana secara cuma-cuma, 17) ikut memperlancar komunikasi pendidikan di masyarakat dalam bentuk penerbitan, siaran radio, TV, pertunjukan dan sebagainya, 18) mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan, 19) ikut mengontrol jalannya pendidikan, 20) bagi tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajer pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga, 21) ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan.

PENDEKATAN MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut teori *challenge and response* (tantangan dan jawaban) yang dikemukakan oleh Gazalba (1966), setiap gerakan itu timbul karena adanya rangsangan/motivasi untuk melakukan reaksi, dengan menciptakan tanggapan dan melakukan perubahan-perubahan. Suatu program untuk bisa diterima oleh masyarakat akan banyak menghadapi tantangan. Semakin besar suatu tantangan akan semakin sulit program diterima. Tantangan dalam peningkatan partisipasi masyarakat antara lain berupa tantangan sosial ekonomi, tantangan budaya, geografis, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah (Harun, 1997).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan berbagai pendekatan sesuai potensi dan latar belakang masyarakat. Upaya pengembangan itu dilakukan agar tumbuh sikap saling peduli, saling membutuhkan, berkembangnya kesadaran individu maupun kolektif terhadap pendidikan. Partisipasi masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat memiliki keyakinan, merasakan manfaat dari tindakan berpartisipasi dan tumbuh saling percaya (*trust*) diantara mereka (Fukuyuma, 2002).

Pendekatan yang umum digunakan dalam mengembangkan partisipasi adalah pendekatan budaya, pendekatan agama dan kepemimpinan baik secara formal maupun informal (Depdikbud, 1995). Pendekatan budaya misalnya dapat dilihat pada ungkapan "berat sama dipikul ringan sama dijinjing", "jer basuki mawa beya". Aktivitas budaya tersebut telah menunjukkan sifat kegotong-royongan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pendekatan religius merupakan dasar yang kuat dan senantiasa berperan dalam kegiatan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilihat dari kaca mata agama menjadi motivasi untuk berpartisipasi dan dapat memberikan dorongan yang kuat untuk kemajuan pendidikan, bahkan semua agama mengajarkan pentingnya pendidikan, termasuk beramal melalui penyelenggaraan pendidikan.

Pendekatan kepemimpinan juga dapat digunakan karena masyarakat kita menghargai pemimpin dan orang yang dituakan, baik pemimpin formal maupun informal. Anjuran pemimpin (tokoh masyarakat) melalui berbagai kesempatan dialog pemimpin informal dengan masyarakat amat membantu dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat perlu didorong (Supriono dan Achmad, 2001), diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dengan kerangka manajemen, termasuk salah satunya dengan mengoptimalkan komite sekolah. Partisipasi masyarakat yang rendah masih dapat ditingkatkan dengan syarat kepala sekolah mampu dan berani mengambil keputusan dalam memajukan sekolahnya, tidak hanya bekerja sama dengan guru, melainkan melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Menurut Supriono (2001) bentuk partisipasi tidak hanya pemberian dana. Kepala sekolah harus mampu memberikan motivasi dan kesempatan kepada orang tua murid/komite sekolah/tokoh masyarakat untuk berperan, dan untuk itu kepala sekolah harus mampu mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, komite sekolah ditingkatkan peran dan fungsinya, ditingkatkan pemahaman tentang partisipasi masyarakat, kemampuan pendekatan dan upaya mengoptimalkan bermacam-macam partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan.

Berbagai komponen masyarakat dan bentuk partisipasinya menurut Prabangkit (2003) adalah (1) orang tua/wali murid, berperan memberikan sumbangan uang, yang sebenarnya dapat juga memberikan bantuan sarana

prasarana, tenaga dan pemikiran, (2) pejabat pemerintah, sebagai nara sumber, motivator, pendukung ketenagaan, sarana prasarana, keamanan dan ketertiban. Pejabat pendidikan dengan memberikan saran pemikiran berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah, (3) tokoh masyarakat, sebagai penggerak kelompok masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pendidikan, dan (4) dunia usaha, sebagai pendukung dana, sumber belajar dan pengembangan teknologi.

Dalam upaya mengembangkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, berbagai komponen tersebut diwadahi dalam komite sekolah, hal ini sesuai dengan tujuan komite sekolah untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sedang peran komite sekolah adalah (1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (2) pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, (4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat (Kepmendiknas RI, No. 044/U/2002).

Komite sekolah yang dibentuk di setiap sekolah akan berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan bila diperankan oleh sekolah. Kepala sekolah harus mampu dan berani mengambil keputusan dalam memajukan sekolah bersama dengan komite sekolah.

Berkait dengan fungsi manajer dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Stewart (1998) dalam Prabowo (2003) mempersyaratkan perlakuan khusus untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan :

a. Membuat mampu (*enabling*); yaitu keyakinan bahwa masyarakat memiliki sumber daya (waktu, personal, uang, gagasan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

- b. Memperlancar (*facilitating*), yaitu meniadakan halangan, memperhatikan apa yang diperlukan sehingga terjadi saling tukar informasi antara sekolah dengan masyarakat.
- c. Berkonsultasi (*consulting*) antar masyarakat, sehingga masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsinya.
- d. Bekerjasama (*collaborating*) antar berbagai pihak secara bebas dan terbuka dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk memastikan perubahan yang dituju.
- e. Membimbing (*mentoring*) dengan bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi orang yang diberdayakan dengan cara menyampaikan kecakapan dan pengetahuan serta mendorong mereka untuk saling melatih.
- f. Mendukung (*supporting*) dan membantu orang untuk mandiri dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan tugas manajemen sekolah, yaitu dengan mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Lembaga pendidikan merupakan sistem terbuka (Pidarta, 1987), sehingga memungkinkan melibatkan sub sistem di luar pendidikan untuk mensukseskan tujuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing. Partisipasi yang diberikan baik oleh individu maupun kelompok perlu dikembangkan terus dengan berbagai pendekatan, salah satunya dengan memberdayakan komite sekolah, sehingga aktif mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal diperlukan perkerayaan sosial. Salah satu strategi peningkatan partisipasi adalah "kotak partisipasi masyarakat" (Sewel & Coppock, 1977). Strategi dari teori ini ditempuh dengan (1) membuat rancangan kebijakan, (2) menginformasikan rancangan kepada masyarakat, (3) mengumpulkan tanggapan dari masyarakat dan menampung ide lain

yang relevan, serta (4) memadukan antara pendapat masyarakat dengan perencanaan.

Partisipasi masyarakat dalam suatu program pendidikan akan tumbuh apabila berkembang keyakinan mereka terhadap program itu, kemanfaatan yang akan diperoleh, dan *trust*. Keterlibatan masyarakat dalam suatu program harus dalam keseluruhan proses pengolahan. Agar partisipasi terlaksana dengan baik ada dua prasyarat : (1) adanya kemauan pihak yang memiliki otoritas untuk mendistribusikan kewenangannya pada masyarakat sebagai mitra dalam proses, dan (2) adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengambil bagian dalam proses yang ada. Untuk melakukan itu dapat diupayakan dengan cara : (1) melakukan penyadaran kepada masyarakat, dan (2) melakukan pendekatan kepada masyarakat.

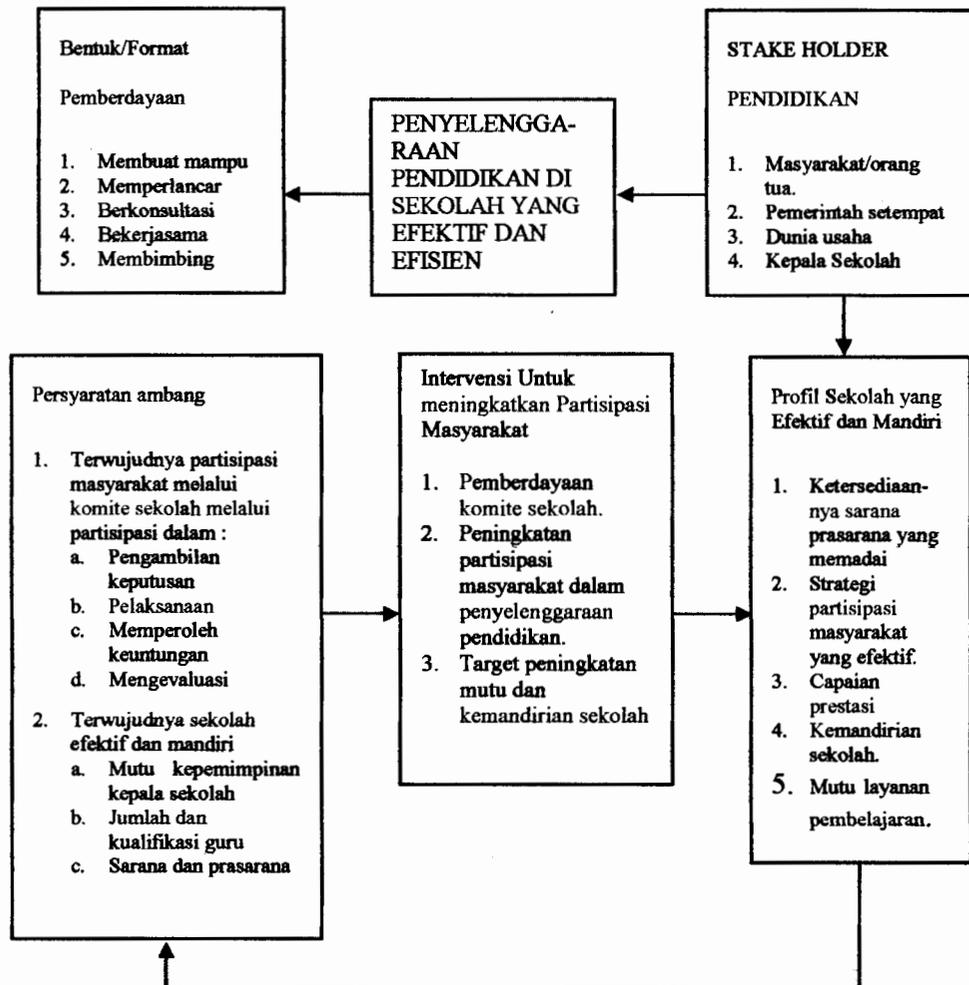
Pengembangan partisipasi masyarakat mencakup dua hal yang mendasar yaitu penyadaran dan penguatan atau pemberdayaan. Keduanya memerlukan komitmen untuk melakukannya. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan perlu memperhatikan tiga komponen, meliputi : (1) bagaimana menumbuhkembangkan potensi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, (2) bagaimana mengoptimalkan pranata yang ada, dan (3) bagaimana mengoptimalkan peran jaringan antara instansi.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip : (1) kemitraan (*partnership*), (2) kemanfaatan yang dirasakan bersama-sama, (3) pengakuan atas keberadaannya dan hak orang lain (*voice*), (4) manajemen terbuka, (5) saling mempercayai (*mutual trust*), (6) akuntabilitas, (7) informasi yang benar, tepat waktu, dan bermakna, serta (8) membangun pelayanan yang baik (Suyata, 1999).

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) pendidikan harus mengupayakan pemberdayaan komite sekolah agar efektif dan mandiri. Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat melalui input komite sekolah tersebut dilanjutkan dengan proses berupa : (1) motivasi untuk saling memiliki, (2) semangat untuk membangun, (3) peran serta, (4) pembentukan pemahaman, wawasan dan aturan, serta (5) tugas-

tugas yang harus dilakukan. Dengan input dan proses tersebut diharapkan output berupa : (1) terbentuknya komite sekolah, (2) berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas komite sekolah, (3) tercipta budaya kualitas, (4) kemandirian sekolah, dan (5) mutu layanan pembelajaran.

Sarana meningkatkan partisipasi menurut Pidarta (1990) adalah kepemimpinan yang efektif dan iklim organisasi. Sedang metode yang digunakan yaitu metode survei umpan balik, penemuan konfrontasi, tim pembangun, saling memberi data secara terbuka, proses konsultasi, model struktur (termasuk teknik analisa peranan dan memperkaya tugas), dan kelompok T. Sedang Daft menambahkan siklus kualitas (Daft, Cunningham, dalam Pidarta, 1990).



Gambar 2. Kerangka Pengembangan Partisipasi Masyarakat

(Sumber: Prabowo, 2003; disesuaikan)

PENUTUP

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diperlukan peran aktif banyak pihak baik upaya pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah. Upaya pemberdayaan dilakukan juga terhadap kepala sekolah dan komite sekolah sehingga dari tindakan itu kepala sekolah dapat mengembangkan partisipasi masyarakat.

Kualitas penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor dalam hal ini peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat menjadi fokus pemberdayaan yang begitu diperlukan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hafid, 2001, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Sebuah Usulan Program*, dalam Jalal, Fasli., Supriadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Darmaningtyas, 1999, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, K. & Newstrom, JW, 1985, *Human Behavior at Work*, New York: McGraw Hill 5th Edition.
- Depdikbud, 1995, *Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Diknas, 2000, *Bekerjasama dengan Masyarakat*, Jakarta: Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP.
- Draha Talizuduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jendral Dikdasmen, 1999, *Panduan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Depdikbud.
- Jalal, Fasli, Supriadi, Dedi, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Julia Brannen, 1997, *Memachu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Terjemahan Iman Syafi'i Noorhadi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.

150 *Pemberdayaan Komite Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Agung Pramono*

Kurnia, Ukun, 2001, *Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan di SMU Mathla'ul Anwar Pusat Menes Kabupaten Pandeglang*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Mulyasa, E., 2002, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Talizaduhu, 1990, *Perbandingan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: PT. Gramedia.

Nursisto, 2002, *Peningkatan Prestasi Sekolah Menengah*, Yogyakarta: Insan Cendikia.

Pidarta, Made, 1980, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Prabangkit, Didik, 2000, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah*, Makalah, Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas.

Sunarto, 2001, *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya: Unesa University Press.

Sumarno, 1995, *Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan untuk Semua, Cakrawala Pendidikan*, Edisi Khusus Dies, Mei, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.

Supriono, S. Achmad Sapari, 2001, *Manajemen Berbasis Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Melalui Pemberdayaan Masyarakat Otonomi Sekolah dan Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan (PAKEM)*, Surabaya: SIC.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*.